

**MODEL SPASIAL
DALAM PEMBANGUNAN**

Oleh:

Ir. Herman Wilianto MSP

Tulisan Untuk Koleksi

PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG, JANUARI 1989

DAFTAR ISI :

	hal.
I. PENDAHULUAN	1
II. MODEL INTEGRASI FUNGSIONAL DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH.3	
II.1. KONSEP KUTUB PERTUMBUHAN	4
II.2. KONSEP "TEMPAT PUSAT" ("CENTRAL PLACE THEORY")	5
II.3. DAMPAK KUTUB-KUTUB PERTUMBUHAN PADA POLA SPASIAL PEMBANGUNAN	7
II.4. TINJAUAN ALTERNATIF MODEL-MODEL INTEGRASI FUNGSIONAL	9
III. MODEL INTEGRASI TERITORIAL DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH	12
IV. PENUTUP : MODEL MANA YANG PALING TEPAT	15
KEPUSTAKAAN	17

MODEL SPASIAL DALAM PEMBANGUNAN

I. PENDAHULUAN

Walaupun studi-studi tentang masalah ekonomi telah lama menarik perhatian para ekonom (seperti Adam Smith, Marx, Keynes dll.), namun mereka terutama tertarik pada problem-problem statis ekonomi dalam kerangka sosial budaya Barat (Eropa)¹⁾. Masalah pembangunan ekonomi nasional baru mulai mendapat perhatian besar pada tahun 1940'an. Setelah Perang Dunia II para ekonom mulai mengarahkan perhatiannya pada problem-problem pembangunan negara berkembang yang baru memperoleh kemerdekaannya. Perhatian mereka ini berkembang seiring dengan ambisi pemimpin-pemimpin baru negara berkembang untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara yang dipimpinnya serta munculnya kesadaran beberapa negara maju bahwa, kemiskinan dimanapun berada, dapat mempengaruhi (bahkan mengancam) kesejahteraan mereka.

Teori-teori ekonomi sampai dengan tahun 1950'an masih didasari oleh pengalaman negara-negara maju serta tak dikaitkan dengan pengembangan tata-ruang (bersifat aspasial)²⁾. Sedangkan teori-teori tata-ruang yang ada waktu itu³⁾ bersifat statis, tak dikaitkan dengan perencanaan dan pembangunan ekonomi. Hirschman (1958) dan Myrdal (1957) adalah orang-orang pertama yang mengenali implikasi spasial dari suatu proses pembangunan ekonomi. Teori merekalah yang menjembatani jurang antara model-model pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Mereka mengungkapkan adanya ketidak-seimbangan perkembangan (antar sektor dan antar wilayah) dalam proses pembangunan.

Pada tahun 1960'an mulai berkembang teori-teori pengembangan wilayah yang dilandasi pemikiran bahwa pembangunan nasional yang terlalu bersifat sektoral dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lokasi dan proses penjalaran pertumbuhan dalam ruang akan mempertajam kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan⁴⁾.

Literatur-literatur tentang teori pengembangan wilayah yang memuat dasar-dasar teknis untuk memutuskan dimana sebaiknya suatu sumber-daya dan proyek dialokasikan, dimana

1) Jhingan, M.L., (1976), The Economics of Development and Planning, New Delhi, Vikas Publishing House PVT.LTD, h.3.

2) Teori ekonomi Neo-Klasik bersifat aspasial karena menganut konsep keseimbangan ("equilibrium"). Keseimbangan antar daerah akan terjadi dengan sendirinya karena adanya arus informasi yang sempurna, mobilitas faktor produksi, harga pasar dan pasar yang kompetitif.

3) Antara lain teori lokasi von Thunen (1826), Christaller (1933), Losch (1940) dari Jerman dan teori North (1955), Hoover (1937), dari Amerika.

4) Miller, J.C. (1979), Regional Development: A Review of the State of the Art, Office of Urban Development-Bureau for Development Support-Agency for International Development-U.S Department of State, Washington D.C, h.8.

pertumbuhan kota harus terjadi, dimana tipe pertumbuhan pertanian atau penggunaan lahan tertentu perlu dikembangkan mulai bermunculan.

John Friedmann yang menulis rangkaian artikel tentang perencanaan wilayah pada akhir tahun 1950'an dan awal tahun 1960'an, kemudian bersama-sama William Alonso menerbitkan koleksi bacaan tentang perencanaan dan pengembangan wilayah yang pertama⁵⁾

Namun teori-teori perencanaan wilayah yang masih belum genap berusia 30 tahun ini kini berada dalam krisis. Banyak pemikir-pemikir yang berpengaruh besar dalam teori pengembangan wilayah (misal Friedmann, Stohr dan Hilhorst) telah meragukan validitas teori-teori mereka. Himbauan untuk mengkaji kembali masalah-masalah sentral dalam teori pengembangan wilayah bermunculan (Hilhorst, 1980; Dunham, 1982; Weaver, 1981). Beberapa kajian tentang pergeseran paradigma dikemukakan (Friedmann dan Weaver, 1979; Stohr dan Taylor, 1981).

Saat ini strategi pengembangan wilayah yang dipengaruhi oleh teori-teori pembangunan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama strategi yang menekankan integrasi teritorial, menekankan penciptaan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, berkembang dari tradisi perencanaan wilayah di Amerika tahun 1930'an dengan tokohnya Lewis Mumford dan Howard Odum⁶⁾. Tradisi ini muncul kembali dalam bentuk baru pada akhir tahun 1970'an sebagai strategi pembangunan dari bawah yang menekankan kemandirian internal, menekankan mobilisasi sumber-daya alam, manusia dan kelembagaan setempat dengan tujuan utama untuk pemenuhan kebutuhan pokok penduduk setempat. Motivasi untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan harus dimunculkan dan dikendalikan dari bawah. Pada intinya strategi dari bawah ini berorientasi pada kebutuhan pokok, sumber-daya setempat, teknologi tepat guna, padat karya, skala kecil, dan berpusat di pedesaan⁷⁾. Model spasial strategi ini ialah Strategi Pengembangan Agropolitan yang dikemukakan oleh John Friedmann dan Mike Douglass tahun 1978 sebagai alternatif dari strategi yang menekankan integrasi fungsional yang dikritiknya.

Strategi kedua yang menekankan integrasi fungsional, mengkaitkan pengembangan wilayah dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional yang mulai menarik perhatian dunia setelah Perang Dunia ke II. Dalam strategi yang dikenal sebagai pembangunan dari atas ini peran pemerintah pusat menjadi sangat dominan, industrialisasi dianggap akan membuka jalan menuju peningkatan pendapatan dan kekayaan nasional. Pendekatan dari atas ini berakar dari teori ekonomi neo-klasik dan pewujudan spasialnya adalah konsep

5) Friedmann, J. & William Alonso, ed, (1964), Regional Development and Planning, Cambridge, MIT Press.

6) Friedmann, J & Clyde Weaver, (1979), Territory and Function, London, Edward Arnold, h.5.

7) Stohr, W.B., & D.R.F. Taylor, Development from Above or Below?, Chichester, John Wiley and Sons, h.1.

"pusat pertumbuhan". Pengembangan wilayah dikaitkan dengan lokasi industri, urbanisasi dan hubungan antar kota yang menunjang proses industrialisasi. Model spasial strategi ini ialah Strategi Kutub Pertumbuhan dengan variasinya Strategi Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Strategi Pengembangan Ruang Terintegrasi.

Berikut ini akan dibahas kedua tipe model spasial dalam pembangunan tersebut. Pertama akan dibahas model-model yang menekankan integrasi fungsional, baru kemudian dibahas model yang menekankan integrasi teritorial. Tinjauan terutama akan dilakukan terhadap landasan teoritisnya serta evaluasi terhadap implementasinya.

II. MODEL INTEGRASI FUNGSIONAL DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH.

Konsep utama dalam model integrasi fungsional berkembang dari konsep kutub pertumbuhan ("Growth Pole") yang dikemukakan oleh Perroux⁸⁾ dan teori tempat pusat ("Central Place Theory") dari Christaller dan Losch.

Istilah Pusat Pertumbuhan dan konsep Kutub Pertumbuhan ini menjadi populer sejak tahun 1950'an. Walaupun sekarang hasil-hasil pembangunan sebagai penerapan konsep kutub pertumbuhan yang dikenal sebagai pembangunan dari atas mulai banyak dipertanyakan, namun teori perencanaan dan pengembangan wilayah yang diwarnai oleh strategi ini masih mendominasi kegiatan pembangunan di negara-negara berkembang⁹⁾. Sebagai contoh di India, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang ke III, dibangun industri-industri besar di wilayah yang terbelakang dengan tujuan untuk mencapai perkembangan wilayah yang lebih seimbang¹⁰⁾. Pemerintah militer Peru yang berkuasa tahun 1968 mendorong pelokasian industri-industri besar terintegrasi di luar Lima, ibu kota Peru, dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber-daya alam serta mengurangi ketidak-seimbangan distribusi penduduk¹¹⁾. Dan sejak pertengahan tahun 1970'an, Philipina, Indonesia, Malaysia dan Muang-Thai boleh dikatakan menganut strategi kutub pertumbuhan dengan desentralisasi industri untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik pada pertumbuhan kota-kota antar wilayah serta pemanfaatan sumber daya di daerah pinggiran¹²⁾.

- 8) Lihat Perroux, F., (1970), "Notes on the Concept of 'Growth Poles'", dalam McKee, R.d. Dean & W.H. Leahy, (ed), Regional Economics, New York, The Free Press, h.93-103.
- 9) Hansen, N.M., (1981), "Development from Above : The Centre-Down Development Paradigm", dalam Stohr, W.B., & D.R.F. Taylor, Development from Above or Below?, Chichester, John Wiley and Sons, h.15.
- 10) Misra, R.P., K.V. Sundaram dan Prakasa Rao, (1974), Regional Development Planning in India - a New Strategy, Delhi, Viking
- 11) Hilhorst, J.G.M., (1981), "Peru : regional planning 1968-77; frustrated bottom-up aspirations in technocratic military setting", dalam Stohr, W.B., & D.R.F. Taylor, Development from Above or Below?, Chichester, John Wiley and Sons
- 12) Salih, k. dkk., (1978) "Decentralization Policy, growth pole approach and resource frontier development : a synthesis of the response in four south-east Asian countries" dalam Lo, Fu-Chen &

Pada prinsipnya model integrasi fungsional ini beranggapan bahwa pusat-pusat pertumbuhan berupa sektor-sektor ekonomi yang dinamis pada lokasi tertentu dengan berbagai ukuran yang hirarkis akan menjalankan pertumbuhan melalui hirarki pusat-pusat/kota-kota tersebut ke wilayah belakang masing-masing. Berikut ini akan dibahas teori-teori yang melandasi konsep kutub / pusat pertumbuhan dan perkembangannya.

II.1. KONSEP KUTUB PERTUMBUHAN

Gagasan kutub pertumbuhan pertama kali dikemukakan oleh Francois Perroux. Perroux menaruh perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada perusahaan-perusahaan dan industri-industri serta inter-relasinya. Konsep kutub pertumbuhan diperkenalkan oleh Perroux untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi modern, untuk menunjukkan proses dimana aktivitas ekonomi seperti perusahaan-perusahaan dan industri muncul, berkembang, mandeg dan menghilang. Ketika pertama kali mengemukakan konsep pusat pertumbuhan, Perroux mengkaitkannya dengan ruang ekonomi abstrak dimana terdapat pusat-pusat kekuatan ekonomi ("centrifugal forces & cetricetal forces") yang memancarkan atau menarik kegiatan ekonomi. Perroux tidak menunjuk pola spasial geografis dari aktifitas ekonomi ataupun penerapan geografis dari pertumbuhan ekonomi dan pergeseran antar industri.

Teori Perroux tampaknya dipengaruhi oleh teori Schumpeter (1949) tentang peranan inovasi dalam perusahaan besar. Bagi Perroux inovasi-inovasi yang diciptakan oleh para entrepreneur merupakan faktor penyebab utama kemajuan ekonomi. Aktivitas-aktivitas paling inovatif terjadi pada unit ekonomi yang besar dan ini akan mendominasi lingkungannya serta punya pengaruh yang bersifat searah terhadap unit-unit ekonomi lainnya baik karena dimensinya, kekuatan negosiasinya ataupun karena sifat operasionalnya. Teori Perroux menyatakan adanya keterkaitan antara skala operasi, domonasi dan dorongan inovasi. Hal ini membawanya pada konsep "perusahaan dinamis dan industri kunci". Karakteristik perusahaan dinamis adalah relatif besar, mempunyai kemampuan inovasi dan termasuk sektor yang berkembang pesat sehingga menciptakan pertumbuhan. Sedang karakteristik industri pendorong/kunci adalah relatif baru, berteknologi maju, produknya mempunyai pasar yang elastis, disamping itu juga punya pengaruh besar (dominan) pada industri-industri lain lewat keterkaitan antar industri ("backward and forward linkages").

Jadi Perroux mendasarkan teorinya pada dua hal yaitu : Keterkaitan antar industri dan teori Schumpeter bahwa pembangunan di dorong oleh gelombang inovasi-inovasi. Berdasarkan teori Perroux pengembangan kompleks industri atau pusat-pusat pembangunan akan mampu mendorong

pengembangan ekonomi. Penciptaan kompleks industri ini dianggap akan menghasilkan beberapa keuntungan¹³⁾ :

- Investasi lebih ekonomis karena investasi bersama dari sejumlah investasi dalam suatu kompleks akan lebih murah dari pada masing-masing perusahaan menanam investasi sendiri-sendiri, terisolasi satu sama lain.
- Efisiensi karena skala yang besar dan memungkinkan spesialisasi.
- Kemungkinan koordinasi dalam eksploitasi sumber-daya dan bahan mentah di lokasi tersebut.
- Kontak yang mudah memungkinkan cepatnya difusi inovasi teknologis.

Penerapan konsep kutub pertumbuhan pada konteks geografis dan regional pertama kali dilakukan oleh Boudeville¹⁴⁾. Beliau menekankan karakteristik regional dari ruang ekonomi. Dari usaha Boudeville memodifikasi teori kutub pertumbuhan dari ruang fungsional ke ruang geografis maka terciptalah jalan penghubung kepada teori teori tentang organisasi aktivitas manusia pada ruang geografis yang dikembangkan oleh Christaller (1933) dan Losch (1940) dengan nama "Central Place Theory".

II.2. KONSEP "TEMPAT PUSAT" ("CENTRAL PLACE THEORY")

Teori tempat pusat mencoba menjelaskan struktur organisasi spasial, antara lain; karakteristik pola pengelompokan aktivitas manusia dalam ruang (lokasi, distribusi, besaran dan kepadatan distribusi, perbedaan fungsi); jaringan pergerakan manusia, barang dan informasi yang menghubungkan pengelompokan tersebut.

Jika pendekatan Perroux bersifat induktif, maka Christaller dan Losch memakai metode deduktif. Berdasarkan asumsi bahwa manusia berusaha mengorganisir aktivitasnya pada ruang geografis dengan cara yang efisien, mereka secara deduktif merumuskan prinsip-prinsip struktur organisasi spasial dari aktivitas manusia tersebut. Asumsi-asumsi berikutnya yang melandasi analisa mereka ialah :

- Ruang dianggap homogen datar dengan distribusi sumber-daya yang merata, termasuk distribusi penduduk yang merata, keinginan konsumen dan teknologi yang sama.¹⁵⁾
- Semua produsen dan konsumen bertindak laku rasional, berusaha meminimumkan biaya dan melaksanakan fungsi produksi dan konsumsi sesuai dengan data.

13) Alayev, E.B., (1968), *Location and Regional Planning; A Short Dictionary*, United Nations Economic Commission for Africa, Addis Abeba.

14) Pertama Boudeville, (1961), menulis dalam bahasa Perancis: *Les espaces économiques*, Paris., tulisannya yang ke dua (1966), *Problems of Regional Economic Planning*, Edinburgh, Edinburgh University Press

15) Asumsi ini dianggap tidak konsisten karena berawal dengan asumsi bahwa lingkungan adalah homogen, tapi akhirnya terjadi konsentrasi bagi berbagai pusat produksi.

- Tiap produk mempunyai fungsi permintaan yang berbeda.
- Model didasari oleh 3 faktor utama : adanya kegiatan pemakaian ruang, biaya transport dan skala ekonomi ("economies of scale").

Christaller dan Losch mendasari model-model mereka dengan asumsi-asumsi yang sama, mengabaikan adanya "external economies", komoditi perantara dan keterkaitan antar perusahaan. Perbedaan Christaller dan Losch terletak pada cara mereka menyusun wilayah pasar dari perusahaan-perusahaan dalam struktur organisasi spasial. Christaller memulai dengan jangkauan spasial terjauh dan mengembangkan organisasinya dari atas, sedangkan Losch mulai dari bawah dengan barang-barang yang mempunyai jangkauan spasial terpendek. Hasilnya ternyata berbeda. Model Christaller untuk tipe kegiatan pelayanan ("services") yang "immobile", sedang model Losch untuk komoditi yang dapat ditransportasikan. Model Christaller memungkinkan pusat-pusat pada level yang lebih tinggi melayani pusat-pusat pada level yang lebih rendah, tapi tak memungkinkan pusat-pusat pada level yang sama saling melayani. Sedangkan model Losch memungkinkan pusat-pusat pada level yang sama saling melayani. Namun keduanya sependapat bahwa pengaturan trianggular dari pasar segi-enam ("hexagonal") akan menggambarkan organisasi yang optimal untuk suatu barang/kegiatan pelayanan dengan pencapaian yang sama dari semua jurusan.

Teori Tempat Pusat ("Central Place Theory") ini dapat dipandang sebagai pelengkap teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Boudeville. Walaupun teori Boudeville menjelaskan dampak perkembangan pusat-pusat pembangunan pada suatu lokasi dalam ruang geografis, tapi teori tersebut tidak menjelaskan dimana pusat-pusat pertumbuhan akan terlokalisir pada ruang geografis. Untuk menjelaskan hal ini teori kutub pertumbuhan harus mengacu pada teori lokasi yaitu "teori tempat pusat" yang menjelaskan saling ketergantungan antar aktivitas-aktivitas pelayanan yang muncul dari pembagian kerja spasial. Namun teori tempat pusat tak menjelaskan fenomena pertumbuhan, bersifat statis dan hanya menjelaskan adanya pusat-pusat dengan pola tertentu, tak berbicara apa-apa tentang bagaimana proses pola tersebut muncul dan berkembang dan berubah di masa depan. Padahal ini merupakan pertanyaan penting. Berikut ini akan dibahas teori-teori yang menyoroti kejadian geografis dan transmisi pembangunan yang sering dipakai untuk menjelaskan proses difusi pembangunan antar pusat-pusat pembangunan serta perubahannya.

II.3. DAMPAK KUTUB-KUTUB PERTUMBUHAN PADA POLA SPASIAL PEMBANGUNAN

Usaha pertama menyoroti mekanisme transmisi pembangunan pada ruang geografis dilakukan oleh Hirschman¹⁶⁾. Beliau mengemukakan argumen bahwa perkembangan ekonomi pada hakekatnya merupakan proses yang tak seimbang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas teori pertumbuhan seimbang dari Cassel (1927), Nurkse (1953), Rosenstein-Rodan (1943). Menurut Alber O. Hirschman, setiap wilayah atau daerah punya kualitas, potensi, sejarah dan kesempatan yang berbeda ("locational advantage"). Jadi kemajuan ekonomi tak akan berlangsung pada waktu yang bersamaan di semua tempat. Dan pada kenyataannya daerah yang telah berkembang mempunyai kecenderungan terkonsentrasi secara spasial¹⁷⁾. Jadi dalam suatu daerah akan muncul satu atau beberapa pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Ada kecenderungan dari investor untuk berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan disekitar kutub pertumbuhan dan mengabaikan kesempatan yang telah muncul atau dapat diciptakan di tempat lain. Jarang orang mau membangun suatu industri dasar baru atau memanfaatkan potensi pembangunan di daerah yang belum / kurang berkembang. Yang biasanya terjadi ialah penilaian yang berlebihan terhadap keuntungan ekonomi eksternal ("external economies") pada suatu kutub pertumbuhan. Maka terjadilah pertumbuhan yang tidak seimbang yang mungkin akan disertai dengan tetesan kebawah ("trickling down effects") yang berupa peningkatan permintaan atau investasi kedaerah kurang berkembang. Daerah maju akan menyerap sebagian penganggur terselubung yang ada di daerah kurang berkembang, sehingga meningkatkan produktifitas marginal dan tingkat konsumsi di daerah tersebut. Namun karena daerah maju lebih efisien, mempunyai kemampuan tawar menawar ("bargaining") yang lebih baik, seringkali daerah maju bukannya menyerap pengangguran terselubung melainkan menyedot teknisi, manajer dan pengusaha muda berpotensi tinggi dari daerah kurang berkembang tersebut. Hal ini disebut efek polarisasi. Walaupun begitu Hirschman masih optimis bahwa penetesan ke bawah akan lebih kuat dari efek polarisasi. Menurut Hirschman keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan terjadinya efek penetesan tersebut.

Gunnar Myrdal (1957) juga menyadari bahwa jika pemerintah tidak secara aktif campur tangan dalam kegiatan ekonomi dan membiarkan mekanisme pasar berjalan mengatur pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pembangunan antar daerah akan semakin berbeda. Karena pada umumnya kegiatan industri, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya lebih lancar dan lebih menguntungkan di daerah kaya dibandingkan dengan di daerah miskin, maka pembangunan di daerah kaya akan tetap lebih cepat dari pada di daerah miskin. Dari masa ke masa

16) Hirschman, A.O., (1958), *The Strategy of Economic Development*, New Haven, Yale University Press, babx

17) Hal ini dijelaskan dengan konsep "agglomeration economies"

jurang perbedaan antara daerah miskin dan kaya akan semakin lebar.

Gunnar Myrdal mengemukakan adanya "backwash-effects" yang menyebabkan daerah miskin menghadapi lebih banyak hambatan dalam pengembangan ekonominya. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan prasarana / fasilitas sosial yang lebih baik mendorong penduduk dari daerah miskin pergi ke daerah kaya. Pada umumnya penduduk yang pergi ini adalah kaum muda, golongan yang lebih berpendidikan, berpengalaman dan ulet. Artinya yang tertinggal di daerah-daerah miskin adalah golongan penduduk yang kurang cakap, rendah produktivitasnya, kurang berpendidikan, kurang ulet, kaum tua dan anak kecil. Disamping itu penduduk daerah miskin umumnya tingkat kesehatannya lebih rendah, fertilitas tinggi, cara berfikir masih tradisional sehingga sukar menerima perubahan. Berbagai faktor tersebut menyebabkan daerah miskin potensinya terbatas dalam pembangunan.

Gunnar Myrdal juga melihat adanya dampak positif dari daerah kaya. Pembangunan di daerah kaya akan menyebabkan pertambahan permintaan akan hasil produksi dari daerah miskin, terutama hasil pertanian. Gunnar Myrdal menyebut dampak positif ini "spread-effects". Namun Myrdal pesimis dan menilai bahwa "spread-effects" ini jauh lebih lemah dari pada "backwash-effects", sehingga makin lama jurang kesejahteraan antara kedua daerah tersebut akan semakin lebar.

Kesenjangan tersebut mungkin akan berhenti melebar, kalau perkembangan di daerah kaya telah mencapai kondisi sebagai berikut :

- Terjadi "external dis-economies", yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya biaya pembangunan. (misalnya : pembangunan jalan di kota yang padat akan lebih mahal dari pada di kota kecil, harga tanah di kota besar yang semakin mahal, dsb.).
- Tingkat gaji dan pembayaran lain atas faktor-faktor produksi bertambah mahal sehingga menaikkan ongkos produksi di daerah kaya.
- Perkembangan di daerah kaya yang sudah mapan mengakibatkan sulitnya memperbaharui faktor-faktor produksi. Dalam hal demikian inovasi lebih mudah diterapkan di daerah lain yang baru berkembang.

Myrdal menunjuk bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan dan semakin cepat pertumbuhan ekonomi, maka "spread-effects" juga akan semakin kuat dibandingkan dengan "backwash-effects". Atau dengan kata lain akan terjadi netralisasi atas "backwash-effects" jika negara terus berkembang. Oleh karena itu penting sekali untuk mempercepat pertumbuhan.

Tampaknya Myrdal dan Hirschman sepakat bahwa pembangunan ditujukan untuk mengefisienkan "spread-effects". Hanya bedanya Hirschman menekankan perlunya ketidak

seimbangan geografis untuk merintis pembangunan, sedang Myrdal menekankan pentingnya memperkuat mekanisme "spread-effects".

Terlepas dari ketidak-sepakatan mereka tentang strategi pembangunan, Hirschman dan Myrdal mengemukakan teori yang serupa untuk menjelaskan mengapa perkembangan cenderung terjadi pada wilayah perkotaan tertentu dan terkonsentrasi disana serta menjelaskan mekanisme penyebaran pembangunan yang serupa pula. Perlu dicatat disini bahwa penekanan mereka bukan pada teori spasial, tapi teori pembangunan ekonomi. Namun teori mereka melengkapi teori Perroux, Christaller, Losch dan Boudeville, melandasi pengembangan model-model spasial pembangunan yang menekankan integrasi fungsional.

II.4. TINJAUAN ALTERNATIF MODEL-MODEL INTEGRASI FUNGSIONAL

Pewujudan teori-teori tersebut diatas dalam model spasial pembangunan secara garis besar dapat digolongkan lagi menjadi tiga.

Pertama pengembangan kutub-kutub pertumbuhan yang terbentuk oleh kompleks industri yang pada kenyataannya identik dengan pengembangan kota-kota. Model spasial yang populer dengan nama strategi kutub pertumbuhan ini menekankan pengembangan terpolarisasi dengan cara desentralisasi industri-industri pendorong ("propulsive industries") pada daerah yang kurang berkembang. Asumsi yang tersirat yaitu bahwa kesenjangan kesejahteraan antar wilayah akan dapat diatasi dengan menciptakan pembangunan terpolarisasi di wilayah yang terbelakang¹⁸⁾. Industri-industri yang besar ("economic dominance"), yang punya banyak keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan punya tingkat pertumbuhan yang pesat, dianggap akan menjalankan pertumbuhan ke daerah sekitarnya. Kompleks industri dengan keuntungan agglomerasi yang tercipta diharapkan berperan sebagai kota pusat wilayah yang memelopori pembangunan di wilayah tersebut. Namun penerapan strategi ini di negara-negara Asia banyak mendapat kritik. Penciptaan kutub pertumbuhan mengarah pada kegiatan padat modal dengan teknologi modern yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah, ketergantungan pada sektor modern / luar negeri, serta menciptakan dualisme spasial¹⁹⁾. Demikian pula kritik-kritik dilontarkan terhadap penerapan strategi di negara-negara Amerika Latin (Conrey, 1974) dan India (Misra, Sundaram dan Rao, 1974).

Kutub-kutub pertumbuhan ternyata tak mendorong pertumbuhan daerah belakangnya. Walaupun kesenjangan antar

18) Konsep desentralisasi terkonsentrasi ini ("concentrated decentralization") terutama hasil elaborasi Friedmann (1966) dan Rodwin (1961) terhadap konsep Perroux tentang kutub pertumbuhan.

19) lihat Lo, Fu-Chen dan Kamal Salih (1978), "Growth Poles and Regional Policy in Open Dualistic Economies : Western Theory and Asian Reality", dalam Lo, Fu-Chen dan Kamal Salih, ed., Growth Pole Strategy and Regional Development Policy ; Asian Experiences and Alternatives Approaches, Oxford, Pergamon Press, h. 258-259.

wilayah dapat dikurangi, tapi karena tetesan kebawah di tingkat lokal lemah, maka kesenjangan intra-wilayah dan desa kota meningkat²⁰⁾.

Strategi kutub pertumbuhan (industri perkotaan) yang populer tahun 1960'an pada tahun 1970'an mulai merosot popularitasnya. Strategi mulai beralih pada model alternatif yang kedua dan ketiga yaitu kebijaksanaan untuk pengembangan kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan pedesaan / "rural growth centres" (Strategi Pengembangan Kota-Kota Kecil) dan kebijaksanaan yang bertujuan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan nasional (Strategi Pengembangan Ruang Terintegrasi).

Model kedua sebagai alternatif dari strategi kutub pertumbuhan dikemukakan oleh E.J.A. Johnson (1970), ekonom Amerika. Johnson mengatakan bahwa kota-kota primat menghambat pengembangan wilayah. Peningkatan migrasi dari desa ke kota metropolitan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi. Proses perubahan sosial yang tak tertata ini merupakan pemborosan energi produktif dan kreatifitas yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk tugas-tugas pembangunan yang konstruktif²¹⁾. Tapi proses ini malah diperkuat oleh perencanaan-perencanaan pembangunan yang percaya pada kekuatan misterius industri-industri skala besar dan penyebaran pembangunan dari kota.

Johnson tak menuduh bahwa urbanisasi itu jelek, yang menjadi problem yaitu distribusi spasial dan hirarki kota-kota. Negara-negara berkembang harus menjembatani kekosongan antara desa-desa dan kota primat yang bersifat parasit²²⁾ dengan menciptakan hirarki pusat-pusat perkotaan dari kota kecil, menengah sampai metropolitan. Tapi tugas ini tak dapat dilakukan dari puncak hirarki kota-kota seperti yang diusulkan oleh Berry dan Friedmann. Untuk penyesuaian hirarki kota-kota harus diciptakan dahulu jaringan kota-kota kecil yang mengintegrasikan desa-desa kedalam wilayah fungsional ekonomi yang lebih besar.

Langkah pertama yang diusulkan Johnson adalah menciptakan jaringan yang baik antara titik-titik pertumbuhan. Titik-titik pertumbuhan ini berupa daerah pedesaan yang mempunyai potensi untuk menjadi kota-desa ("agro-urban communities")²³⁾. Untuk pengembangan titik-titik pertumbuhan tersebut diperlukan penciptaan kelembagaan seperti pasar, sekolah kejuruan dan umum, bank dan koperasi simpan pinjam, klinik dan puskesmas. Koordinasi dalam kegiatan penggilingan padi dan pergudangan perlu dilakukan. Investasi infrastruktur, listrik dan jaringan jalan diperlukan untuk meningkatkan "keuntungan lokasi" bagi wirausahawan, demikian pula diperlukan penciptaan kawasan

20) lihat Gore, Charles, (1984), Regions in Question: Space, Development Theory and Regional Equity, London, Methuen & Co Ltd., h.118-119.

21) Johnson, E.J.A., (1970), The Organization of Space in Developing Countries, Cambridge, Mass, Harvard University Press, h.161-162.

22) Johnson, (1970), h.212.

23) Johnson, (1970), h.219.

industri dan insentif untuk industri kecil modern yang padat karya dan melayani pasar lokal atau memproses produk pertanian lokal. Untuk itu perlu di bentuk lembaga perencanaan lokal dan daerah. Kesemuanya ini memerlukan biaya yang besar, padahal umumnya negara berkembang dihadapkan pada batasan dana yang dimilikinya. Menurut Johnson sumber-daya terbatas yang sekarang terserap pada industri besar di metropolitan dapat dipindahkan untuk mempromosikan industri kecil di kota-kota kecil. Kesepakatan untuk menyebarkan industri ini tentu akan menghilangkan keuntungan skala ekonomi dan keuntungan aglomerasi ("economies of scale and agglomeration economies") yang diperoleh industrialis metropolitan. Namun menurut Johnson modernisasi industri pedesaan lebih menguntungkan, dan penyebaran industri ke kota-kota kecil akan membangkitkan potensi kreativitas dan inovasi.

Tujuan Johnson dengan penciptaan kota-kota kecil juga untuk mengembangkan komersialisasi pertanian skala kecil. Johnson berasumsi bahwa petani umumnya bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan subsisten saja. Kemandegan pertanian ini bukan karena ketidak-efisienan petani skala kecil atau karena metode produksi tradisional mereka, tapi terutama karena kurangnya jangkauan pasar, tiadanya pasar yang kompetitif dimana petani dapat membeli masukan untuk produksi dan barang konsumsi yang murah, serta dapat menjual produknya dengan harga yang layak. Oleh karenanya pembangunan kota kecil harus dirancang untuk mengatasi problem ini, yaitu sebagai pusat pertumbuhan desa. Kota kecil harus dikaitkan dengan daerah belakangnya membentuk wilayah ekonomi fungsional dengan menciptakan keterkaitan desa-kota melalui investasi infrastruktur dan keterkaitan kegiatan ekonomi.

Pola pengembangan kota-kota kecil seperti yang dikemukakan oleh Johnson juga diusulkan oleh Rondinelli (1983). Rondinelli melihat bahwa lembaga-lembaga bantuan dunia mulai berpaling dari problem perkotaan ke masalah penanganan kemiskinan di desa setelah bantuan asing dan kebijaksanaan nasional yang cenderung bias ke perkotaan selama tahun 1950'an dan 1960'an membawa dampak peningkatan kemiskinan dan kesenjangan desa-kota di negara-negara berkembang.

Penanganan pembangunan desa timbul sebagai reaksi kegagalan strategi industrialisasi padat modal, berorientasi ekspor yang mengkonsentrasikan kekayaan di kota-kota metropolitan. Kebijakan kutub pertumbuhan tak berbuat banyak untuk mengembangkan daerah belakangnya, bahkan sering memperbesar dualisme perekonomian wilayah²⁴⁾. Oleh karenanya strategi kutub pertumbuhan fokusnya dialihkan kepada kota-kota menengah ("secondary cities") yang "cukup besar" untuk menciptakan fungsi-fungsi sosial-ekonomi untuk penduduknya dan daerah disekitarnya. Namun argumen akan potensi peran

24) Rondinelli, Dennis A., (1983), *Secondary Cities in Developing Countries: Policies for Diffusing Urbanization*, Beverly Hills, Sage Publications.

kota-kota menengah dalam pengembangan wilayah dan nasional kurang didukung pemahaman terhadap karakter sosial, ekonomi, demografi, kelemahan dan kekuatan kota-kota menengah tersebut untuk merangsang ekonomi daerah belakangnya²⁵⁾.

Rondinelli mengingatkan bahwa untuk menciptakan pertumbuhan urbanisasi yang lebih seimbang tak cukup dengan mengatasi masalah kota-kota menengah, tapi harus didukung dengan kebijaksanaan ekonomi yang kondusif bagi penyebaran pertumbuhan kota. Pola urbanisasi saat ini sering mencerminkan keputusan pembangunan aspasial. Misal kebijaksanaan substitusi import, regulasi perdagangan, investasi modal asing, pengendalian migrasi, kebijaksanaan moneter, perpajakan, gaji, pertanahan, bahkan struktur organisasi pemerintahan, secara tak langsung besar pengaruhnya pada pola spasial pembangunan ekonomi dan menentukan sejauh mana kota-kota menengah dapat bersaing dengan kota primat metropolitan²⁶⁾.

Model spasial ketiga sebagai reaksi terhadap strategi kutub pertumbuhan dipelopori oleh sekelompok konsultan yang bekerja untuk USAID pada tahun 1970'an. Model Pengembangan Ruang Terintegrasi dikemukakan oleh Rondinelli dan Ruddle (1978). Pada hakekatnya strategi ini mirip dengan yang dikemukakan oleh Johnson, yaitu ingin mencapai struktur ekonomi yang seimbang melalui keterkaitan antara pusat-pusat perkotaan dengan wilayah yang luas dan mengembangkan pola tata ruang yang memungkinkan adanya pusat-pusat yang merangsang komersialisasi pertanian dan melengkapinya dengan sistem pertukaran barang dan pelayanan yang efisien. Bedanya Rondinelli dan Ruddle ingin mengintegrasikan sistem ekonomi melalui sistem kota-kota yang hirarkis tiga tingkatan dalam wilayah pedesaan ("rural service centres, small market towns and regional centre").

Asumsi yang melandasi model Rondinelli dan Ruddle ini ialah bahwa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negara berkembang berakar dari perbedaan akses terhadap aktivitas produktif dan pelayanan sosial, jadi dengan meningkatkan aksesibilitas penduduk desa terhadap hirarki pusat-pusat perkotaan pemerataan sosial akan terjadi. Namun Rondinelli tak menjelaskan lebih lanjut bagaimana hal ini akan membawa pertumbuhan yang lebih merata.

III. MODEL INTEGRASI TERITORIAL DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Dari sudut pandang teori ketergantungan model-model integrasi fungsional (strategi kutub pertumbuhan, pengembangan kota-kota kecil, pengembangan ruang terintegrasi) tak akan dapat mencapainya. Penganut teori ketergantungan berpendapat bahwa kegagalan untuk mencapai pertumbuhan dengan pemerataan bukan terletak pada

25) Rondinelli, Dennis A., (1983), h.41.

26) Rondinelli, Dennis A., (1983), h.199.

buruknya artikulasi sistem spasial, tapi justru disebabkan oleh pola keterkaitan dalam sistem tersebut.

Santos²⁷⁾ mengatakan bahwa strategi yang mencoba menciptakan integrasi pedesaan dengan ekonomi nasional akan mengakibatkan ketimpangan sehingga hubungan saling menunjang antara kota dan daerah belakangnya tak mungkin terjadi. Penduduk desa yang memperoleh keuntungan dari perkembangan kota akan meningkatkan konsumsi mereka dari pusat-pusat metropolitan yang mendorong pertumbuhan disana, sedangkan mereka yang tak memperoleh keuntungan dari kebijaksanaan tersebut akan bermigrasi ke kota besar yang menawarkan harapan ("the city of hope"). Pertumbuhan didalam integrasi fungsional juga secara langsung atau tak langsung akan tergantung pada ekonomi internasional.

Pada akhir tahun 1970'an muncul strategi baru dalam pengembangan wilayah yang mawadahi teori ketergantungan. Strategi ini tak menyarankan integrasi suatu daerah dengan perekonomian internasional. Gagasan yang dikemukakan yaitu pengembangan wilayah lokal atau regional melalui ketertutupan spasial yang selektif ("selective spatial closure/selective territorial closure"). Caranya yaitu dengan mengembangkan kekuatan masyarakat lokal/regional sehingga mereka bukan saja dapat merencanakan pengembangan sumberdaya mereka sendiri sesuai kebutuhan mereka, tapi bahkan mampu mengendalikan hubungan keluar yang mungkin akan membawa akibat negatif terhadap perkembangan mereka.

Pada tahun 1978, Friedmann dan Mike Douglass²⁸⁾ mengutarakan bahwa strategi pembangunan perlu ditinjau kembali untuk lebih memprioritaskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan hanya melihat pertumbuhan GNP semata. Pembangunan harus mengurangi tingkat ketergantungan pada dunia luar dan lebih mengutamakan kemandirian dengan meningkatkan produksi pedesaan. Demikian pula ketimpangan pendapatan harus dikurangi²⁹⁾

Friedmann dan Douglass mengemukakan strategi alternatif yang disebut Pengembangan Agropolitan. yang mencakup elemen-elemen sebagai berikut :³⁰⁾

- kriteria keberhasilan pembangunan nasional harus diubah dari pemuasan kebutuhan yang tak terbatas menjadi pemenuhan kebutuhan manusia yang khas dan terbatas.
- pertanian harus didudukkan sebagai sektor pemimpin atau pendorong ("leading or propulsive sector") dalam ekonomi.
- pencapaian kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan harus mendapat prioritas utama

27) Santos, M., (1974), *Geography, Marxism and Underdevelopment*, Antipode, 6, h.1-9.

28) Friedmann, J, dan Mike Douglass, (1978), *Agropolitan Development : Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia*, dalam Lo, Fu-Chen dan Kamal Salih, ed., *Growth Pole Strategy and Regional Development Policy ; Asian Experiences and Alternatives Approaches*, Oxford, Pergamon Press.

29) Friedmann, J, dan Mike Douglass, (1978), h. 181.

30) Friedmann, J, dan Mike Douglass, (1978), h. 181-182

- ketimpangan pendapatan dan kondisi kehidupan antar kelas sosial dan antara kota dan desa harus dikurangi.
- fasilitas untuk peningkatan produksi barang-barang untuk konsumsi domestik harus mendapat prioritas.
- kebijaksanaan untuk industri yang bersifat dualistis perlu diterapkan dimana industri skala kecil untuk pasar domestik harus dilindungi dari persaingan dengan industri padat modal skala besar.

Strategi ini dirancang secara khusus untuk daerah yang masih rendah tingkat urbanisasinya (kurang dari 20%) dan digambarkan sebagai strategi yang akan mempercepat pembangunan pedesaan. Menurut Friedmann dan Douglass wilayah agropolitan berpusat pada kota dengan penduduk antara 10.000 - 25.000 orang dengan jarak antara 5 sampai 10 km (jarak "commuting") yang batas-batasnya ditetapkan berdasarkan karakteristik bahasa, agama atau karakteristik ekologis. Friedmann dan Weaver (1979) mengatakan bahwa strategi ini sesuai untuk kondisi Asia dan sebagian negara Afrika yang tingkat urbanisasinya masih rendah.

Dalam konsep agropolitan ini tampak pergeseran pemikiran dari perencanaan fungsional ke perencanaan teritorial. Ciri teritorial ini tampak pada program-program pembangunan yang harus sejalan dengan keinginan komunitas lokal, baik dalam skala desa, wilayah ataupun nasional. Wilayah agropolitan adalah unit terkecil dimana masih dimungkinkan pemenuhan kebutuhan sendiri dengan sedikit saja masukan sumber-daya dari luar. Disamping itu untuk keberhasilan pengembangan agropolitan ditentukan 3 kriteria yaitu : ketertutupan teritorial secara selektif, komunalisasi kekayaan yang produktif, dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan sosial ("selective territorial closure, the communalization of productive wealth, and the equalization of access to the bases for the accumulation of social power"). Akhirnya perluasan produksi dalam wilayah agropolitan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan harus berlandaskan pengembangan kemandirian.

Pada tahun 1979, Stohr dan Todling dengan paham populisnya mengemukakan konsep ketertutupan spasial yang selektif. Dalam pembahasannya tentang pemerataan spasial mereka mengemukakan 3 kemungkinan strategi untuk mengatasi konflik-konflik yang timbul dalam pembangunan saat itu. Pertama, memberikan prioritas pada perubahan fungsional, yaitu meneruskan kebijaksanaan konvensional. Kedua memberikan prioritas kepada integritas teritorial. Ketiga, manajemen sistem yang kompleks dari perubahan fungsional dan integritas teritorial. Pilihan terakhir ini ditolak karena terlalu teknokratis dan diluar kemampuan analisa sistem. Pilihan yang pertama, integrasi fungsional, hanya dapat mengurangi kesenjangan spasial kondisi kehidupan dengan memberlakukan mekanisme redistribusi untuk "material living condition" yang mau tak mau akan meningkatkan kesenjangan pada "non-material living condition". Pilihan satu-satunya tinggal integritas teritorial. Disini komunitas teritorial

dikembangkan kekuatannya sehingga mereka mampu mengendalikan "backwash-effects". Jadi ketertutupan spasial secara selectif dimaksudkan untuk menyaring "backwash-effects" dan menyerap efek tetesan kebawah.

Pertanyaan utama terhadap pendekatan integrasi teritorial ini ialah bagaimana dalam keterbatasan kemampuan dan ekonomiyang dimilikinya negara-negara berkembang dapat mencapai tujuan-tujuan sosial tersebut.

IV. PENUTUP : MODEL MANA YANG PALING TEPAT

Model model spasial yang telah dikemukakan memang tak merangkum keseluruhan variasi model spasial pembangunan yang ada, namun cukup menggambarkan garis besar pemikiran model spasial yang dominan. Teori-teori pengembangan wilayah di tahun 1950'an - 1970'an dibawah pengaruh konsep kutub pertumbuhan yang dilandasi teori pembangunan yang menekankan pertumbuhan, menitik-beratkan pada pengembangan sumber-daya skala besar, investasi terpusat, pengembangan industri perkotaan di lokasi yang menguntungkan dan bertumpu pada harapan akan terjadinya efek tetesan kebawah atau difusi inovasi. Hasilnya ialah kebijaksanaan yang bias ke perkotaan dan mengabaikan pedesaan. Akibat selanjutnya terjadi ketimpangan desa-kota, kemiskinan di desa, yang mendorong migrasi tak terkendali kekota-kota, dan muncullah problem-problem kota metropolitan.

Mulai akhir tahun 1970'an muncul model-model alternatif dari model kutub pertumbuhan. Perhatian mulai beralih dari skala besar ke skala yang lebih kecil, dari skala metropolitan, industri berskala besar, teknologi modern ke skala kota kecil, agropolitan, industri kecil, teknologi tepat guna.

Lalu dari ke empat model spasial yang telah dikemukakan di depan mana yang paling tepat untuk negara berkembang ? Pertanyaan ini lebih tepat dijawab dengan pertanyaan balik; apakah teori yang melandasi model-model spasial tersebut sah dan dapat dipercaya ("reliable") ? Ternyata teori-teori tersebut masih lemah dan kurang lengkap untuk dapat dijadikan tumpuan.

Dalam seminar tentang alternatif-alternatif pengembangan wilayah yang diselenggarakan oleh UNCRD ("United Nations Centre for Regional Development") tanggal 27-30 Agustus 1980 di Nagoya, Jepang, para pakar perencana wilayah sampai pada kesimpulan bahwa pengembangan wilayah di negara-negara berkembang dihadapkan pada 3 kemiskinan : kemiskinan penduduknya sendiri, kemiskinan teori pengembangan wilayah dan kemiskinan pelaksanaannya³¹).

Charles Gore (1984) dalam pembahasannya tentang strategi pengembangan wilayah mengatakan pula bahwa

31) Mc Gee, T.G. dikutip dalam Mabogunje, A.L., dan R.P. Misra, ed, (1981), Regional Development Alternatives: International Perspectives, Nagoya, Maruzen Asia, h.316.

kelemahan teori-teori pengembangan wilayah terletak pada sifatnya yang diskriptif dan konsepsinya tentang keterkaitan ruang tak lengkap, terlalu banyak asumsi yang menyederhanakan permasalahan, serta kurang penelitian empiris. Kelemahan teori pengembangan wilayah menurut Gore juga mencerminkan kelemahan yang ada pada ilmu-ilmu sosial³²⁾.

Akhirnya "model" hanyalah suatu bentuk penyederhanaan. Pemilihan model selain harus mempertimbangkan kondisi spesifik negara dimana model tersebut akan diterapkan juga menuntut modifikasi-modifikasi. Karena karakteristik wilayah dan masyarakatnya tak ada yang sama persis satu sama lain, maka tepat-tidaknya suatu teori atau model hanya dapat diketahui setelah diuji secara empiris.

32) Gore, Charles, (1984), Regions in Question ; Space, Development Theory and Regional Equity, London, Methuen & Co Ltd. h.209-210.

/ KEPUSTAKAAN :

- Alayev, E.B., (1968), Location and Regional Planning: A Short Dictionary, United Nations Economic Commission for Africa, Addis Abeba.
- Boudeville, J.R., (1961), Les espaces economiques, Paris.
- Cassel, G., (1927), Theoritische Sozial Economic, Leipzig.
- Christaller, (1965), Central Places in Southern Germany, Englewood Cliffs, terjemahan dari versi bahasa Jerman yang diterbitkan di Jena tahun 1933.
- Convoy, M.E., (1974) "Rejection of Growth Centre Strategy in Latin American Regional Development Planning", dalam Lanf Economic, 44(4), h.371-380.
- Dunham, D., (1982), Some views on research in the field of regional development and regional planning, mimeo, Institute of Social Studies, The Hague.
- Friedmann, J., (1966), Regional Development Policy-A Case Study of Venezuela, MIT Press.
- Friedmann, J., dan Mike Douglass, (1978), Aggropolitan Development : Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia, dalam Lo, Fu-Chen dan Kamal Salih, ed., Growth Pole Strategy and Regional Development Policy : Asian Experiences and Alternatives Approaches, Oxford, Pergamon Press,
- Friedmann, J & Clyde Weaver, (1979), Territory and Function, London, Edward Arnold.
- Friedmann, J. & William Alonso, ed, (1964), Regional Development and Planning, Cambridge, MIT Press.
- Gore, Charles, (1984), Regions in Question ; Space, Development Theory and Regional Equity, London, Methuen & Co Ltd.
- Hansen, N.M., (1981), "Development from Above : The Centre-Down Development Paradigm", dalam Stohr, W.B., & D.R.F. Taylor, Development from Above or Below?, Chichester, John Wiley and Sons.
- Hilhorst, J.G.M., (1980), On some resolved issues in regional development thinking, Institute of Social Studies, Occasional Paper, no 51, The Hague.

Hilhorst, J.G.M.,(1981), "Peru : regional planning 1968-77; frustrated bottom-up aspirations in technocratic military setting", dalam Stohr, W.B.,& D.R.F. Taylor, Development from Above or Below?, Chichester, John Wiley and Sons

Hirschman,A.O.,(1958), The strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press.

Jhingan, M.L., (1976), The Economics of Development and Planning, New Delhi, Vikas Publishing House PVT.LTD,

Johnson, E.J.A.,(1970), The Organization of Space in Developing Countries, Cambridge, Mass, Havard University Press.

Lo, Fu-Chen dan Kamal Salih (1978), "Growth Poles and Regional Policy in Open Dualistic Economies : Western Theory and Asian Reality", dalam Lo, Fu-Chen dan Kamal Salih,ed., Growth Pole Strategy and Regional Development Policy ; Asian Experiences and Alternatives Approaches, Oxford, Pergamon Press, h. 258-259.

Losch,A.,(1954), The Economic of Location, New Haven, edisi pertama dalam bahasa Jerman terbit tahun 1940.

Mabogunje,A.L., dan R.P. Misra, ed,(1981), Regional Development Alternatives: International Perspectives, Nagoya, Maruzen Asia

Miller,J.C.(1979), Regional Development : A Review of the State of the Art, Office of Urban Development-Bureau for Development Support-Agency for International Development-U.S Department of State, Washington D.C

Misra,R.P., K.V.Sundaram dan Prakasa Rao,(1974), Regional Development Planning in India : a New Strategy, Delhi, Viking.

Myrdal,G (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions, London, Duckworth.

Nurkse,R.,(1953), Problems of Capital Formation in Developing Countries, Oxford.

Perroux, F.,(1970), "Notes on the Concept of 'Growth Poles'", dalam McKee, R.d. Dean & W.H. Leahy, (ed), Regional Economics, New York, The Free Press, h.93-103.

Perroux,F.,(1950), Economic Space : theory and applications, Quarterly journal of economic, 64, 89-104, dalam Friedmann,J dan William Alonso, ed, (1964), Regional Development and Planning, Cambridge, MIT Press.h.21-58.

- Rodwin, L., (1961), "Choosing Regions for Development" dalam Friedmann, J. & William Alonso, ed, (1964), Regional Development and Planning, Cambridge, MIT Press.
- Rondinelli, Dennis A. dan K. Ruddle, (1978), Urbanization and Rural Development : A Spatial Policy for Equitable Growth, New York, Praeger.
- Rondinelli, Dennis A., (1983), Secondary Cities in Developing Countries : Policies for Diffusing Urbanization, Beverly Hills, Sage Publications.
- Rosenstein-Rodan, (1943), Problem of Industrialization of Eastern and Southern Europe, Economic Journal, June-September.
- Salih, k. dkk., (1978) "Decentralization Policy, growth pole approach and resource frontier development : a synthesis of the response in four south-east Asian countries" dalam Lo, Fu-Chen & Kamal Salih, (ed), Growth Pole Strategy and Regional Development Policy, Oxford, Pergamon.
- Santos, M., (1974), Geography, Marxism and Underdevelopment, Antipode, 6.
- Soegijoko, Sugijanto, (1979), Spatial Efficiency of Urban Centers as a Basis for Regional Development ; A Case Study of South Sumatra, Ph D. Thesis.
- Stohr, W.B., & D.R.F. Taylor, (1981) Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries, Chichester, John Wiley and Sons.
- Stohr, W.B., dan F. Todtling, (1979), "Spatial Equality-some antitheses to current regional development doctrine", dalam Folmer, H. dan Oosterhoven, J. ,ed , Spatial Inequalities and Regional Development, Leiden, Nijhoff.
- Weaver, C., (1981), "Development theory and the regional question: a critique of spatial planning and its detractors", dalam Stohr, W.B., & D.R.F. Taylor, Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries, Chichester, John Wiley and Sons.